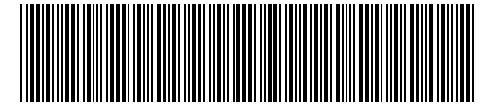




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.409215/2022**



DS:1878-0117-1895-0109

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
4. Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
- Sebesar : Rp. 312.000.000 (TIGA RATUS DUA BELAS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	312.000.000
Rp.	312.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	312.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U (051) Rp. 312.000.000

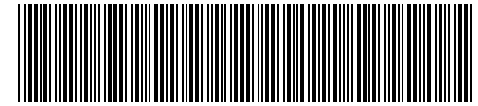
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			312.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			312.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	16,00	Rekomendasi Kebijakan	301.092.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	16,00	Rekomendasi Kebijakan	301.092.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20,00	Orang	10.908.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20,00	Orang	10.908.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

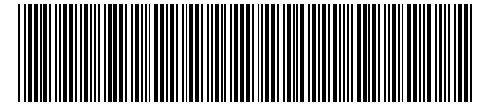
ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022

I B. SUMBER DANA



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	312.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	312.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409215	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	312.000	-	-	-	312.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	312.000	-	-	-	312.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	312.000	-	-	-	312.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	301.092	-	-	-	301.092	18 . 51	
01	RM	-	301.092	-	-	-	301.092	051	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	10.908	-	-	-	10.908	18 . 51	
01	RM	-	10.908	-	-	-	10.908	051	
JUMLAH		-	312.000	-	-	-	312.000		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409215	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	55.808	30.825	26.833	30.833	25.233	25.233	26.233	32.633	30.319	28.048	312.000
		BELANJA BARANG	0	0	55.808	30.825	26.833	30.833	25.233	25.233	26.233	32.633	30.319	28.048	312.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	0	55.808	30.825	26.833	30.833	25.233	25.233	26.233	32.633	30.319	28.048	312.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	55.808	30.825	26.833	30.833	25.233	25.233	26.233	32.633	30.319	28.048	312.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022
IV A. B L O K I R**



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409215] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

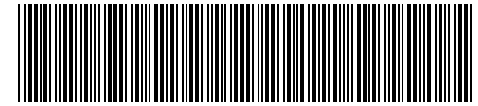
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:1878-0117-1895-0109

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409215] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003